

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo telah diupayakan agar sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta berkeadilan, kepatutan dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya. Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya tercermin dari sisi penerimaan fiskal daerah yang bersumber dari APBD, sumber pendanaan lainnya di luar APBD/non APBD antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *corporate social responsibility (CSR)* atau tanggungjawab lingkungan sosial perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Kabupaten Wonosobo yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran 2020 diawali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah.

2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Target pendapatan daerah pada perubahan tahun 2020 menurun 2,64 persen dibandingkan APBD (Induk) Penetapan Tahun 2020. Penurunan terjadi pada PAD sebesar 7,14 persen. Hampir semua sumber PAD mengalami penurunan. Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 5,89 persen yang disebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat dampak pandemi Covid-19. Retribusi daerah menurun sebesar 32 persen yang disebabkan adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah yang berdampak pada menurunnya pengguna

tempat-tempat pelayanan umum serta pelayanan usaha. Pembatasan sosial masyarakat juga berdampak pada penurunan pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) akibat dampak Covid-19 yaitu lain-lain PAD yang sah menurun sebesar 8,47 persen. Dana transfer pada perubahan tahun 2020 turun sebesar 9,17 persen dibandingkan APBD induk tahun 2020. Penurunan signifikan ada di dana transfer pusat sebagaimana PMK 35/PMK.07/2020, dimana dana alokasi umum menurun 8,87 persen, dana alokasi khusus menurun sebesar 12,74 persen, dana insentif daerah menurun sebesar 6,87 persen sedangkan untuk dana desa mengalami penurunan sebesar 1,16 persen. Realisasi dan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		R. 2016	R. 2017	R. 2018	R. 2019	2020*)	2020**)	R.2020
1.	PAD	179.894.767.510	309.170.757.259	226.819.478.601	238.371.743.591	224.697.826.714	208.649.963.773	251.292.434.575
1.1.	Pajak Daerah	10.274.645.410	38.328.722.023	41.562.348.610	44.753.784.135	41.799.500.000	39.336.900.000	43.412.233.016
1.2.	Retribusi Daerah	11.013.605.521	10.302.666.650	9.712.862.790	11.316.198.526	10.176.290.000	6.871.370.200	6.796.653.214
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	12.070.308.915	25.659.727.540	15.368.536.550	19.266.091.394	17.917.801.994	20.761.198.435	20.539.829.191
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	146.536.207.664	234.879.641.046	160.175.730.651	163.035.669.536	154.804.234.720	141.680.495.138	180.543.719.154
2.	Dana Perimbangan	1.079.170.500.015	1.133.217.018.646	1.139.805.205.659	1.236.562.229.419	1.255.151.878.000	1.140.061.320.580	1.123.108.003.017
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.789.323.015	39.124.031.624	34.626.572.812	29.449.519.543	33.596.113.000	39.678.493.580	36.659.004.117
2.2	Dana Alokasi Umum	841.407.175.000	826.626.357.000	827.791.657.000	877.474.203.000	889.213.906.000	810.365.559.000	799.113.605.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	198.974.002.000	267.466.630.022	277.386.975.847	329.638.506.876	332.341.859.000	290.017.268.000	287.335.393.900
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	296.536.566.155	386.902.558.455	484.816.340.145	483.661.052.562	455.898.451.000	535.897.267.000	468.956.858.856
3.1	Hibah	5.940.000.000	7.256.394.455	87.701.361.841	95.172.223.552	88.544.850.000	108.497.600.000	67.716.864.773
3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	79.333.708.155	91.452.278.000	104.517.169.260	93.801.753.310	99.176.192.000	102.666.149.000	92.912.871.083

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		R. 2016	R. 2017	R. 2018	R. 2019	2020*)	2020**)	R.2020
	dan pemerintah daerah lainnya							
3.3	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	61.209.389.000	50.966.543.000	104.517.169.260	48.748.237.700	-	62.432.000.000	45.074.667.000
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID)		45.730.717.000	8.750.000.000		48.400.106.000	45.074.667.000	46.025.605.000
3.5	Pendapatan lain-lain (Dana desa)	150.053.469.000	191.496.626.000	184.414.648.000	245.938.838.000	219.777.303.000	217.226.851.000	217.226.851.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	1.555.601.833.680	1.829.290.334.360	1.851.441.024.405	1.958.595.025.572	1.935.748.155.714	1.884.608.551.353	1.843.357.296.448

Sumber: Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2021, diolah

Keterangan

*) APBD Tahun 2020

**) Perubahan APBD Tahun 2020

Kebijakan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan peningkatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan, antara lain melalui:
 - a. Peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan.
 - b. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional sehingga diharapkan mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.
3. Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
4. Penyusunan kajian Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- 1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai merupakan alokasi anggaran untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp721.328.577.384,00 dan terealisasi sebesar Rp671.252.893.959,00 untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Wonosobo.
 - b. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
 - c. Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d. Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk hibah kelompok masyarakat pengelola air bersih, bantuan operasional kelompok operasional penyelenggaraan PAUD, BOP pendidikan kesetaraan, hibah kepada badan/lembaga/ organisasi.
Pada tahun 2020 belanja hibah diberikan kepada:

1. Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - KPU Rp40.564.668.000,00
 - Bawaslu Rp12.617.853.500,00
 - Polres Wonosobo Rp1.150.000.000,00
 - Kodim 0707 Rp300.000.000,00
2. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - MUI Rp75.000.000,00
 - KONI Rp300.000.000,00
 - Kwarcab Pramuka Rp379.900.000,00
 - PMI Rp550.000.000,00
 - KORPRI Rp50.000.000,00
 - LVRI Rp17.892.000,00
 - PBSI Rp50.000.000,00
 - KKM TIRTA BISMA Desa Sikunang, Kejajar Rp235.000.000,00
 - KKM TIRTA ZARIYAH Desa Gadingsukuh, Kepil Rp200.000.000,00
 - KKM TIRTO SUMBING Desa Banyumudal, Sapuran Rp200.000.000,00
 - KKM TIRTA CIPTA RAHARJA Desa Wonosroyo, Watumalang Rp200.000.000,00
 - KKM TIRTA WANA Desa Kedalon, Kalikajar Rp245.000.000,00
 - KKM TIRTO LANGGENG Desa Karang Sari, Sapuran Rp245.000.000,00
 - KKM TIRTO WILUJENG Desa Jolontoro, Sapuran Rp245.000.000,00
 - KKM BAKALAN MAKMUR Kelurahan Sapuran Rp35.000.000,00
3. Belanja Hibah Dana BOP PAUD Swasta Rp15.537.000.000,00
4. Belanja Hibah Dana BOP Pendidikan Kesetaraan
 - BOP Pendidikan Kesetaraan PAKET C 1.800.000
 - BOP Pendidikan Kesetaraan PAKET B 1.500.000
 - BOP Pendidikan Kesetaraan PAKET A 1.300.000
- e. Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kepada organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial stimulan perumahan masyarakat miskin, bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 1. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
 - LKS Karya Bakti Rp15.000.000,00
 - LKS Muhammadiyah Kauman Rp15.000.000,00
 - LKS Hj. Maryam Rp15.000.000,00
 - LKS Darul Aitam Rp15.000.000,00
 - LKS Peduli Pendidikan Rp15.000.000,00
 2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
 - Bantuan Sosial Stimulan Rumah Tidak Layak Huni DAK Rp1.802.500.000,00
 - Bantuan Sosial Stimulan Rumah Tidak Layak Huni APBD Rp5.000.000.000,00
 - Bantuan Untuk Orang Cacat Rp526.400.000,00
 3. Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan (Bencana) Rp180.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada pemerintahan desa;
 1. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa Rp 4.512.808.414,00

2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp865.507.873,00
- g. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik.
 - Alokasi dana Desa Rp118.689.233.560,00
 - Dana Desa Rp217.226.851.000,00
 - Pemberian Kompensasi Sekretaris Desa Rp20.000.000,00
 - Ganti Penghasilan Kades/ Perangkat Desa yang bengkaknya dipakai Pemkab Rp25.000.000,00
 - TMMD APBD Provinsi Rp852.000.000,00
 - TMMD APBD Kabupaten Rp561.600.000,00
 - Pengembangan Desa Wisata Lestari Rp500.000.000,00
 - Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp268.354.000,00
 - Bantuan keuangan kepada partai kebangkitan bangsa Rp230.364.000,00
 - Bantuan Partai Hanura Rp43.269.000,00
 - Bantuan Partai Persatuan Pembangunan Rp70.234.000,00
 - Bantuan Partai Nasdem Rp75.793.000,00
 - Bantuan Partai Golkar Rp105.960.000,00
 - Bantuan Partai Demokrat Rp72.512.000,00
 - Bantuan Partai Gerindra Rp102.056.000,00
 - Bantuan Partai Amanat Nasional Rp62.531.000,00
 - Bantuan Partai Perindo Rp43.327.000,00
- h. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam Pandemi Covid-19 yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- 2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
 - c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Dalam kurun waktu 2017-2020 rata-rata peruntukan belanja tidak langsung sebesar 57,82 persen sedangkan belanja langsung sebesar 42,18 persen. Sebagian besar belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 61,31 persen, disusul belanja bantuan keuangan rata-rata sebesar 24,33 persen dan penggunaan belanja hibah rata-rata hanya 3,06 persen. Sedangkan belanja langsung sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa rata-rata sebesar 47,21 persen disusul belanja modal rata-rata sebesar 39,76 persen dan dan belanja pegawai rata-rata sebesar 4,51 persen.

Tahun 2020, Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo diproyeksikan untuk penanganan covid-19 Kabupaten Wonosobo melalui *refocusing* berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119/2813/SJ-177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka alokasi belanja daerah difokuskan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial. Realisasi dan anggaran belanja daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2019 dan Anggaran Tahun 2020 (Rp)

No.	Uraian	R. 2016	R. 2017	R. 2018	R. 2019	2020*)	2020**)	R.2020
1.	Belanja Tidak langsung	1.005.524.738.867	1.000.192.698.517	1.115.231.916.375	1.066.382.571.539	1.190.655.302.386	1.196.130.160.127	1.123.586.532.374
1.1.	Belanja Pegawai	745.596.498.059	689.556.404.517	761.947.256.966	706.706.959.719	746.311.465.326	721.328.577.384	671.252.893.959
1.2.	Belanja Bunga							
1.3.	Belanja Hibah	8.728.200.000	14.202.400.000	56.339.207.139	24.020.877.500	78.609.821.500	77.517.713.500	77.042.213.500
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	73.000.000	4.995.500.000	10.913.104.270	18.938.009.320	12.583.900.000	7.583.900.000	7.320.900.000
1.5.	Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota	4.096.273.050	4.235.150.000	5.107.990.000	5.575.709.000	5.197.579.000	5.378.316.287	5.378.316.287
1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota, Pemdes, Prov. Lain & Parpol	239.582.160.300	283.214.026.000	275.965.398.000	306.529.296.000	342.952.536.560	339.029.084.560	339.028.284.560
1.7.	Belanja Tidak Terduga	7.448.607.458	3.989.218.000	4.958.960.000	4.611.720.000	5.000.000.000	45.292.568.396,00	23.563.924.068
2.	Belanja Langsung	613.615.381.593	715.097.460.681	813.054.815.222	948.844.872.441	864.690.332.984	838.681.806.036	698.204.340.373
2.1	Belanja pegawai	22.708.654.724	41.224.892.704	46.654.934.647	35.464.406.514	49.001.204.519	60.010.918.225	44.004.260.755
2.2	Belanja barang dan jasa	313.997.076.034	362.856.758.055	384.799.220.786	482.614.815.647	496.792.078.551	494.059.883.769,00	429.441.529.693
2.3	Belanja modal	276.909.650.835	311.015.809.922	381.600.659.789	430.765.650.280	318.897.049.914	284.611.004.042,00	224.758.549.925
	Total Jumlah Belanja (1+2)	1.619.140.120.460	1.715.290.159.198	1.928.286.731.597	2.015.227.443.980	2.055.345.635.370	2.034.811.966.163	1.821.790.872.747

Sumber : Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2021, diolah

Keterangan : *) APBD Tahun 2020

**) Perubahan APBD Tahun 2020

2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2020 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka perbaikan kinerja BUMD, yakni antara lain penyertaan modal kepada :

- a. Bank Jateng sebesar Rp5.935.000.000,00
- b. PDAM sebesar Rp16.500.000.000,00
- c. Apotik Bhakti Husada Rp500.000.000,00

Sehubungan dengan tingginya biaya *refocussing* Covid-19, maka sisa lebih anggaran tahun lalu digunakan untuk menutup seluruh defisit anggaran. Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2019 dan Anggaran Tahun 2020

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah (Rp)						
		R. 2016	R. 2017	R. 2018	2019	2020*)	2020**)	R. 2021
1.	Penerimaan Pembiayaan							
1.1.	SiLPA	238.041.000.946	178.535.995.176	271.466.373.121	255.343.671.472	109.532.479.656	148.138.414.810	148.138.414.810,00
1.2.	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000,00
1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Penerimaan pinjaman daerah	63.871.010	0	0	0	0	0	0
1.5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	158.896.058	0	0	0	0	0
1.6.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	99.800.000	114.095.150	0	0	0
	Jumlah penerimaan pembiayaan	238.104.871.956	178.694.891.234	271.566.173.121	255.457.766.622	119.597.479.656	173.138.414.810	173.138.414.810

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah (Rp)						
		R. 2016	R. 2017	R. 2018	2019	2020*)	2020**)	R. 2021
2.	Pengeluaran Pembiayaan							16.363.000.000
2.1.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Penyertaan Modal Daerah	16.030.590.000	21.230.500.000	11.500.000.000	16.119.419.454	14.935.000.000	22.935.000.000	16.363.000.000
2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	25.000.000.000	0	0	
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0		
2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	16.030.590.000	21.230.500.000	11.500.000.000	41.619.419.454	14.935.000.000	22.935.000.000	16.363.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	222.074.281.956	157.464.391.234	260.066.173.121	214.338.347.168	119.597.479.656	150.203.414.810	156.775.414.810

Sumber : Bappeda dan BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2021, diolah

Keterangan : *) APBD Tahun 2020

***) Perubahan APBD tahun 2020

2.2. Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo

Pada tahun 2020 hampir sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020, ditangguhkan atau disesuaikan mengingat adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan komitmennya dalam menangani Covid-19 antara lain melalui alokasi anggaran untuk:

- a. Penanganan Kesehatan
- b. Penanganan Dampak Ekonomi
- c. Jaring Pengaman Sosial

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2020

NO	PRIORITAS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	2	4	5	6
I	PENANGANAN KESEHATAN			
A	Program/Kegiatan			
1	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Dinas Kesehatan	3.064.850.000	2.328.289.827	76%
2	Bantuan operasional kesehatan (BOK) tambahan insentif tenaga kesehatan daerah Dinas Kesehatan	10.923.255.278	10.683.691.096	98%
3	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada RSUD	8.059.920.000	7.392.903.708	92%
4	Pencegahan Dini dan penanggulangan Covid-19 pada BPBD	350.000.000	339.972.600	97%
5	Pelayanan Penampungan Isolasi Komunal Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Tingkat Kabupaten pada BPBD	2.105.700.000	1.570.669.945	75%
6	Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Wonosobo pada Sekretariat Daerah	700.000.000	539.759.266	77%
7	Operasi Terpadu Dukungan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Dinas Permukiman dan Perhubungan	1.342.200.000	1.299.128.000	97%
8	Pencegahan dini dan penanggulangan Covid-19 pada 15 Kecamatan	1.847.231.000	1.719.595.121	93%
9	Penguatan kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada 29 Kelurahan	2.885.574.500	2.686.038.150	93%
	Jumlah A	31.278.730.778	28.560.047.713	
B	Belanja Tidak Terduga			

NO	PRIORITAS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	2	4	5	6
1	RKB Pembangunan Akses masuk Pembangunan Makam Jlegong Kelurahan Pagerkukuh Percepatan Penanganan Covid-19 pada DPU PR	200.000.000	198.000.000	99%
2	RKB Penanganan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada SATPOL PP	89.420.000	84.562.177	95%
3	RKB Percepatan penanganan COVID-19 pada RSUD	500.000.000	151.950.000	30%
4	RKB Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Karantina dan fasilitas pendukung karantina Penanganan Covid-19 pada DISDIKPORA	200.000.000	193.805.000	97%
5	RKB Pematangan Lahan, Biaya Pembuatan Liang Kubur dan Penerangan Jalan ke Makam Jlegong pada DISPERKIHUB	200.000.000	154.500.000	77%
6	Rehabilitasi Gedung Karantina A-B, dan pengadaan barang sarana prasarana karantina di BLK pada DISNAKERINTRAN	300.000.000	299.445.000	100%
7	Patroli, pengamanan, penjagaan, pembinaan, pengendalian Covid-19 pada Kantor SATPOL-PP	644.726.160	442.957.209	69%
8	Pengadaan alat, bahan dan penanganan pasien Covid-19 pada DINKES	7.753.100.000	2.618.539.992	34%
9	Kerjasama media massa dalam menangani Covid-19 pada DISKOMINFO	69.000.000	54.000.000	78%
10	Operasional akibat Covid-19 operasional sarana karantina BLK pada DISNAKERINTRAN	33.000.000	16.329.590	49%
11	Pengadaan alat dan pencegahan penularan Covid-19 pada INSPEKTORAT	22.525.000	20.410.650	91%
12	Penyemprotan desinfektan penanganan Covid-19 pada BPBD	110.125.000	56.292.000	51%
13	Pemenuhan Sarana prasarana pendukung penanggulangan Covid-19 pada RSUD	3.316.566.000	3.157.616.626	95%
14	Pengadaan alat dan bidang kebersihan dan pertamanan akibat dampak Pandemi Covid-19 pada DLH	161.446.000	159.847.000	99%
15	Pelayanan isolasi komunal karantina lanjutan penanganan Pandemi Covid-19 di Gedung SKB & BLK pada BPBD	1.500.000.000	1.074.137.000	72%

NO	PRIORITAS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	2	4	5	6
16	Pembukaan layanan kearsipan dan perpustakaan daerah memasuki masa kenormalan baru pada DISARPUSDA	70.650.000	57.847.500	82%
17	Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tatanan Model Baru Sesuai Protokol Kesehatan pada DPM-PTSP	47.500.000	31.821.400	67%
18	Pelayanan perawatan pasien Covid-19 lanjutan pada BPBD	2.437.785.000	561.769.300	23%
19	Pelayanan isolasi komunal karantina lanjutan Covid-19 di BLK, BAPELKES, Ex. Pertanian dan SKB (BPB)	842.455.500	488.569.000	58%
20	Cadangan Penanganan Kesehatan	3.027.969.736	-	0%
	Jumlah B	21.526.268.396	9.822.399.444	46%
	Jumlah I (A+B)	52.804.999.174	38.382.447.157	73%
II	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI			
A	Program/Kegiatan			
1	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dalam mendukung penanganan dampak COVID-19 pada DISDAGKOP-UMKM	500.000.000	499.997.750	100%
	Jumlah A	500.000.000	499.997.750	100%
B	Belanja Tidak Terduga			
1	Fasilitasi usaha pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif dalam tatanan normal baru akibat Covid-19 pada DISPARBUD	394.300.000	351.973.837	89%
2	Padat karya pada DPU-PR	3.500.000.000	2.982.837.935	85%
	Jumlah B	3.894.300.000	3.334.811.772	86%
	Jumlah I (A+B)	4.394.300.000	3.834.809.522	87%
III	JARING PENGAMAN SOSIAL			
A	Program/Kegiatan			
1	Pengembangan Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada DINSOS-PMD	12.032.515.000	11.890.192.530	99%

NO	PRIORITAS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	2	4	5	6
2	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi warga terdampak Covid-19 pada 29 KELURAHAN	6.034.985.750	5.934.102.572	98%
	Jumlah A	18.067.500.750	17.824.295.102	99%
B	Belanja Tidak Terduga			
1	Penyediaan Cadangan Pangan pada DISPAPERKAN	200.128.950	185.225.000	93%
2	Cadangan Jaring Pengaman Sosial	12.124.871.050	-	0%
	Jumlah B	12.325.000.000	185.225.000	2%
	Jumlah III (A+B)	30.392.500.750	8.009.520.102	59%
	Total I + II + III	87.591.799.924	60.226.776.781	69%